

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membangun karakter dan mempersiapkan individu untuk menjalani kehidupan berdasarkan ajaran agama. Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi pondasi penting dalam mengembangkan pendidikan Islam adalah pesantren. Pesantren telah menjadi wadah bagi penanaman nilai-nilai agama, budaya, dan sosial kepada generasi muda Muslim. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam di pesantren, pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur aspek-aspek pendidikan di pesantren, termasuk melalui pengesahan UU (Undang-Undang) Pesantren.

Perjalanan panjang pesantren sebagai Lembaga Pendidikan yang *independent* tentu tidak mudah menerima sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam sejarah, Pesantren lahir lebih awal daripada Negara Indonesia. Dengan begitu, tantangan perubahan yang harus dihadapi pesantren tidaklah sederhana dan tidak mudah diterima begitu saja. Ada sejumlah tawaran yang seringkali dilematis untuk dipilih. Maka selain pesantren yang tetap konsentrasi kepada pendidikan *tafaqquh fiddin* dengan penguatan kitab kuning, ditemukan juga pesantren yang mengembangkan pendidikan dengan dominasi penguatan pendidikan umumnya untuk para santri. Pilihan lainnya diambil oleh pesantren yang mengambil jalan tengah, yaitu memadukan penyelenggaraan pendidikan umum, namun tetap mempertahankan kajian kitab kuningnya.

Meski demikian, pesantren tetap mampu bersanding dengan system Pendidikan modern, sehingga terdapat nilai-nilai progresif dan inovatif yang diadopsi sebagai suatu strategi dalam mengejar ketertinggalan dari model Pendidikan yang lain. Menurut

Nurcholish Madjid, secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman tetapi juga mengandung makna keaslian (indigenous) Indonesia.¹ Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam asli Indonesia dengan konsep pendidikannya diadopsi dari Hindhu-Budha, sedangkan Islam melanjutkannya, mengembangkannya dan mengislamkannya. Pesantren sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan terus berkembang hingga saat ini.² Konsep yang diberikan dalam pesantren tentu berbeda dengan Pendidikan umum, dan inilah yang menjadi dikotomi dalam Pendidikan. Walaupun pesantren sangat berperan dalam pembangunan serta berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), alumni pesantren seringkali tidak diterima untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi, bahkan sulit diterima ditempat kerja. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengapresiasi kinerja pesantren melalui Program Pesantren Mu'adalah yang memberikan pengakuan kepada lulusan pesantren dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Dengan pendidikan Mu'adalah, siswa mendapatkan ijazah yang diakui oleh pemerintah, sehingga dapat mempermudah para santri melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan semata, akan tetapi terdapat fungsi Lembaga sosial sebagai media penyebaran dan penyiaran agama islam. Pesantren menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan status sosial, menerima dan menjadi pemecah masalah bagi tamu yang datang dari masyarakat umum dengan motif yang berbeda-beda.³

Berdirinya suatu pesantren diawali dengan pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau Kyai. Karena keinginan menuntut dan memperoleh

¹ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Grasindo, 2001), 103

² . M Dawam Rahrjo, *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985), vii

³ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 289

ilmu dari guru tersebut, maka masyarakat sekitar bahkan dari luar daerah datang kepadanya untuk belajar. mereka lalu membangun tempat tinggal yang sederhana disekitar tempat tinggal guru tersebut. semakin tinggi ilmu seseorang guru, maka semakin banyak pula orang dari luar daerah yang datang untuk menuntut ilmu kepadanya dan berarti semakin besar pula pondok pesantrennya.⁴ Sedangkan biaya kehidupan dan pendidikan disediakan bersama-sama oleh para santri dengan dukungan masyarakat di sekitarnya dan inilah sumber awal pendirian pesantren pada masa tradisional.

Menurut Abuddin Nata dalam bukunya sejarah pendidikan Islam mengemukakan bahwa sistem pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang pada saat kerajaan Islam memimpin terdapat unsur visi misi, tujuan, kurikulum guru, murid, proses belajar mengajar, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, lingkungan, kerjasama, penilaian, dan lulusan yang keadaannya masih sederhana dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. semua komponen yang terdapat dalam sistem pendidikan Islam tersebut belum dirumuskan secara tertulis dengan prinsip-prinsip pendidikan modern seperti yang terdapat pada masa sekarang.⁵

Dalam buku George Makdisi Pendidikan Islam sangat pesat dan maju pada masa dinasti abbasiyah, dalam hal pendidikan mereka sangat konsisten dan banyak dana-dana khusus yang disediakan untuk kepentingan Pendidikan Islam, salah satu dana yang diberikan untuk Pendidikan Islam yakni Lembaga wakaf baik yang dimiliki pemerintah ataupun milik pribadi yang disumbangkan untuk Pendidikan.⁶ Ibnu Jabir pernah bercerita tentang sebuah pengayoman yang ia saksikan sendiri pada penuntut ilmu yang berada di Damaskus dan Kairo. Para penuntut ilmu tersebut disediakan asrama, diberikan beasiswa dan biaya hidup.⁷

⁴ Iskandar Engku, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 116

⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: kencana, 2011), 272

⁶ George Makdisi, *The Rise Of Humanism In Classical Islam And The Chritian West*, (Edinburgh : Edinburgh University Prees), 60

⁷ Mundzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya)*, (Damaskus: Dar al-Fikr), X

Pada masa tersebut telah melakukan banyak hal dalam pengembangan pendidikan dengan mendirikan dan mendukung berbagai sarana penunjang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Salah satu sumber pembiayaan pendidikan adalah dari pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan. Dimana pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan agar kelangsungan pendidikan Islam berjalan dengan baik. Majunya suatu peradaban bangsa jika pendidikan menjadi prioritas bagi negara itu sendiri. Demikian juga dalam pendidikan Islam sendiri, sumber pembiayaannya diperoleh dari negara.⁸

Pada zaman penjajahan di Indonesia, pendidikan pesantren amat banyak dirugikan dan disengsarakan, dalam perkembangannya kelompok tradisional atau pesantren yang semula hanya mengelola pendidikan yang sepenuhnya Agama, kini telah mendirikan madrasah. Sedang dalam biaya pendidikan pesantren berasal dari kekayaan yang dimiliki Kyai serta sedekah, infaq Dan hibah dari para dermawan yang jumlahnya tidak pasti, serta tidak dilakukan pembukuan, melainkan secara langsung dikelola oleh Kyai yang dibantu oleh para santri yang dipercaya.⁹

Masuk pada orde lama yang dalam hal ini kepemimpinan ada ditangan Presiden Soekarno yang berlangsung dari sejak tahun 1945 hingga 1965 yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno mendirikan Departemen Agama yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946. Kementerian ini mengurus bidang pendidikan yang berhubungan dengan agama. Namun disamping itu, pemerintah juga mendirikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menimbulkan pengelolaan pendidikan yang dikotomis yang selanjutnya berdampak buruk terhadap nasib pendidikan agama, yaitu berupa adanya perlakuan yang

⁸ Abd Mukti, "The Financial Aspects of Islamic Education (An Idea to Improve the Quality of Islamic Education in Islamic Boarding Schools)", *Jurna Pendidikan dan Kejuruan*, 2 No. 12 (2020), 988.

⁹ *Ibid*, 290.

diskriminatif dari pemerintah terhadap pemberian anggaran pendidikan agama, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Sebagai sebuah institusi yang mengutamakan ajaran religius Islam, pemerintah tidak terlibat banyak dalam pengembangan pesantren di Indonesia. Selain dari keterlibatan di PDF, SPM, dan Ma'had Aly, pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur kurikulum, fasilitas, infrastruktur, dan kualitas pengajaran di pesantren informal. Maka dari itu, tidak seperti sekolah formal, pesantren tidak memiliki standardisasi. Meskipun terdapat kemiripan di antara sesama pesantren.

Undang-Undang tentang pesantren ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan diberlakukan pada tanggal 16 Oktober 2019. Kemudian, diterbitkannya UU dana abadi pesantren yang diundangkan tepatnya pada 2 September 2021 yang menyatakan bahwa sumber dana penyelenggaraan pesantren terdapat dari a. Masyarakat, b. Pemerintah Pusat, c. Pemerintah Daerah, d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, e. Dana Abadi Pesantren.¹⁰

Dengan memahami latar belakang masalah ini, penelitian tentang "Analisis Kebijakan UU Pesantren dalam Perkembangan Pendidikan Islam Perspektif Sosio-Historis" akan memberikan wawasan yang mendalam tentang dampak kebijakan ini terhadap pendidikan Islam di Indonesia dan bagaimana pesantren beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Pesantren dalam perspektif Historis?
2. Bagaimana eksistensi pesantren dalam perspektif UU No. 18 Tahun 2019?

¹⁰ Undang-undang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Jakarta: JDIH Kementerian Kesekretariatan Negara), 3.

3. Bagaimana penerapan kurikulum pendidikan Islam perspektif UU No. 18 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan UU Pesantren dalam perkembangan pendidikan Islam dari perspektif sosio historis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konteks sosio historis Pendidikan Islam: mengidentifikasi faktor-faktor sosio dan historis yang telah membentuk perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi UU Pesantren.
2. Mengkaji peran pesantren dalam Pendidikan Islam: menginvestigasi peran tradisional dan modern pesantren dalam system Pendidikan Islam di Indonesia, serta bagaimana peran ini berubah seiring waktu dalam merespon terhadap perubahan-perubahan.
3. Menjelaskan penerapan kurikulum pendidikan Islam menurut UU No. 18 Tahun 2019, Mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya. Mengevaluasi efektivitas penerapan kurikulum tersebut, Memberikan rekomendasi untuk peningkatan penerapan kurikulum pendidikan Islam.

Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan implikasi UU Pesantren dalam perkembangan pendidikan Islam dari perspektif sosio historis.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah kegunaan yang relevan bagi berbagai pihak dan aspek dalam konteks perkembangan pendidikan Islam dan kebijakan publik di Indonesia. Beberapa kegunaan utama dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Kontribusi terhadap Kebijakan Publik: Hasil analisis kebijakan UU Pesantren dari perspektif sosio historis dapat memberikan pandangan berharga kepada pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dampak dan implikasi kebijakan tersebut terhadap perkembangan pendidikan Islam. Ini dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan sosial dan historis.
- b. Pengembangan Pesantren yang Berkelanjutan: Hasil analisis tentang interaksi antara tradisi dan modernitas dalam pesantren dapat memberikan wawasan tentang cara menjaga nilai-nilai tradisional sambil mengakomodasi perkembangan modern. Hal ini dapat membantu pengelola pesantren dalam merancang strategi pengembangan yang berkelanjutan.

2. Secara Praktis

- a. Pemahaman lebih mendalam tentang pendidikan Islam: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pesantren, sebagai salah satu komponen utama pendidikan Islam di Indonesia, berperan dalam konteks sosial dan sejarah. Ini dapat meningkatkan kesadaran tentang keunikan dan perubahan dalam pendidikan Islam.
- b. Pemahaman dalam masyarakat: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang peran penting pesantren dalam perkembangan pendidikan Islam. Hal ini dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan mendukung apresiasi terhadap nilai-nilai pendidikan Islam.

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan data bagi penelitian selanjutnya yang ingin menjelajahi lebih dalam tentang perkembangan pendidikan Islam dan dinamika pesantren dalam konteks sosio historis. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan akademis yang dapat berdampak positif pada pengembangan pendidikan Islam, masyarakat, dan kebijakan di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dari judul tesis "Analisis Kebijakan UU Pesantren Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Perspektif Sosio Historis" adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebijakan UU Pesantren: Ini merujuk pada proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap kebijakan yang diusulkan dalam Undang-Undang (UU) tentang pesantren. Analisis kebijakan melibatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang relevan dengan pesantren dan penilaian dampak dari kebijakan yang diusulkan terhadap pesantren dan pendidikan Islam secara umum.
2. Pesantren: Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, di mana siswa belajar tentang agama Islam, bahasa Arab, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Pesantren sering kali memiliki peran penting dalam pendidikan dan budaya Islam di Indonesia.
3. Perkembangan Pendidikan Islam: Ini merujuk pada proses evolusi dan perubahan dalam metode, konten, dan pendekatan dalam pendidikan Islam seiring waktu. Fokus pada perkembangan pendidikan Islam dalam konteks judul tesis ini mengacu pada bagaimana pesantren dan pendidikan Islam secara umum telah berkembang sepanjang sejarah.
4. Perspektif Sosio Historis: Ini mengacu pada sudut pandang analisis yang melibatkan aspek sosial dan sejarah. Dalam konteks tesis ini, perspektif sosio historis melibatkan

memahami pengaruh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah terhadap perkembangan pesantren dan pendidikan Islam.

Jadi, secara keseluruhan, judul tesis tersebut berbicara tentang proses analisis kebijakan terkait Undang-Undang (UU) tentang pesantren, dengan fokus pada perkembangan pendidikan Islam dalam konteks historis dan sosial.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan dalam penelitian ini, maka ditemukan beberapa penelitian dahulu yang mengkaji tentang Pesantren. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Kebijakan UU Pesantren Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Perspektif Sosio Historis. Maka peneliti dapat mencantumkan hasil penelitian yang ada, yaitu;

1. Adnan Mahdi, 2017 Telah menghasilkan penelitian dengan judul “Sejarah dan Peran pesantren dalam Pendidikan di Indonesia”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa Perkembangan pesantren di Indonesia telah melewati empat fase, yakni era kelahiran dan pertumbuhan, era revolusi, era sebagai benteng ideologi, dan era media dalam membangun umat Islam. Fase awal dimulai pada masa Wali Songo hingga masa penjajahan. Era revolusi terjadi sekitar tahun 1959-1965. Masa benteng ideologi berlangsung pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Sementara itu, era media untuk pembangunan umat Islam dimulai pada tahun 1990-an hingga saat ini. Dalam rentang sejarah yang panjang ini, pesantren telah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan nasional Indonesia, termasuk sebagai inspirasi dalam merumuskan sistem pendidikan nasional, menghasilkan tokoh intelektual pendidikan, dan menjadi model pendidikan karakter.¹¹

¹¹ Adnan Mahdi, “Sejarah dan Peran pesantren dalam Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Islamic Review*, 2, No. 1 (April 2013 M. / Jumadi As-Sani 1434, 2017).

2. Herman, 2013 telah menghasilkan penelitian dengan judul “Sejarah Pesantren di Indonesia”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa Asal mula pesantren dalam sejarah bermula dari pengaruh budaya Hindu-Budha yang datang dari India. Saat Islam masuk dan banyak masyarakat memeluk agama Islam, proses pendidikan yang sebelumnya terpengaruh oleh agama Hindu-Budha mengalami perubahan. Pengaruh tersebut diadaptasi dan diubah menjadi sistem pendidikan Islam yang baru. Sejarah mencatat bahwa Pondok Pesantren telah dikenal di Indonesia sejak zaman Walisongo. Saat itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya yang menjadi pusat pendidikan di Jawa. Santri-santri dari berbagai wilayah di Pulau Jawa datang untuk memperdalam ilmu agama. Bahkan, beberapa santri berasal dari Gowa dan Tallo, Sulawesi. Pesantren Ampel, yang didirikan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim, dianggap sebagai titik awal pendirian pesantren-pesantren di Indonesia karena para santri yang menyelesaikan studi di sana merasa memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu di daerah asal mereka. Inilah yang mendorong pendirian pondok-pondok pesantren dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diperoleh dari Pesantren Ampel. Pesantren Ampel Denta juga menjadi tempat para wali, yang kemudian dikenal sebagai wali songo atau sembilan wali, mengasah kepribadian mereka. Dari pesantren Giri, santri seperti Datuk di Bandang dari Minang membawa ajaran Islam ke Makassar dan wilayah Timur Indonesia lainnya. Dari Makassar, tokoh seperti Syekh Yusuf lahir, menjadi ulama besar dan pelopor pergerakan nasional. Peradaban Islam pun merambat dari Makassar ke Banten, Srilanka, dan bahkan hingga Afrika Selatan.¹²

¹² Herman, “Sejarah Pesantren di Indonesia”, Jurnal al-Ta’dib, 6 No. 2 (Juli – Desember, 2013).

3. Abd Mukti, 2020 Dengan judul “*The Financial Aspects of Islamic Education (An Idea to Improve the Quality of Islamic Education in Islamic Boarding Schools)*” menghasilkan penelitiannya bahwa Pembiayaan pendidikan dalam Islam pada prinsipnya menekankan pada penyaluran biaya dan tanggung jawab pendidikan yang harus diemban oleh masyarakat. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan pendidikan mencakup besaran biaya yang harus dikeluarkan serta sumber-sumber pendanaan yang digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan asalnya, biaya pendidikan diperoleh melalui pembiayaan dari pemerintah, masyarakat, dan baitul mal. Namun, tantangan utama dalam pembiayaan pendidikan Islam muncul karena keterbatasan dana dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini, mempertimbangkan aspek pendanaan pendidikan, penyelenggara pendidikan perlu merencanakan dengan cermat. Jika pelaksanaannya hanya bergantung pada pihak-pihak tertentu, hal ini bisa mengindikasikan kurangnya keseriusan penyelenggara pendidikan dalam mengembangkan pendidikan tersebut.¹³

Tabel 1.1.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu

NO	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Sejarah dan Peran pesantren dalam Pendidikan di Indonesia	Pesantren di Indonesia mengalami empat fase perkembangan: kelahiran dan pertumbuhan, revolusi, benteng ideologi, dan media dalam membangun	Mengungkap pengertian pesantren serta sejarah pesantren dengan jelas dan penuh referensi	Dalam penelitian Adnan Mahdi ini tidak membahas biaya yang didapat oleh pesantren, serta tidak membahas campur tangan pemerintah dalam pembiayaan pesantren

¹³ Abd. Mukti, Yusnali Budianti, Hamdani, “The Financial Aspects of Islamic Education (An Idea to Improve the Quality of Islamic Education in Islamic Boarding Schools)”, *Internasional Jurnal For Education and Vocational Studies*, 2, No. 12, (Desember 2020).

		<p>umat Islam. Fase awal dimulai saat Wali Songo hingga penjajahan. Era revolusi terjadi sekitar 1959-1965. Benteng ideologi mencakup tahun 1970-an hingga 1980-an. Era media pembangunan umat Islam dimulai tahun 1990-an hingga kini. Dalam sejarah panjang, pesantren memberikan kontribusi besar pada pendidikan nasional Indonesia, menjadi inspirasi dalam merumuskan sistem pendidikan, menghasilkan intelektual pendidikan, dan model pendidikan karakter.</p>		
2	Sejarah Pesantren di Indonesia	<p>Pesantren Ampel, yang didirikan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim, dianggap sebagai titik awal pendirian pesantren di Indonesia karena para santri yang menyelesaikan studi di sana merasa memiliki</p>	<p>Mengungkap pengertian pesantren serta sejarah pesantren dengan jelas dan penuh referensi</p>	<p>Dalam penelitian Adnan Mahdi ini tidak membahas biaya yang didapat oleh pesantren, serta tidak membahas campur tangan pemerintah dalam pembiayaan pesantren</p>

		<p>kewajiban untuk menyebarkan ilmu di daerah asal mereka. Inilah yang mendorong pendirian pondok pesantren dengan mengikuti prinsip-prinsip yang mereka peroleh dari Pesantren Ampel. Pesantren Ampel Denta juga menjadi tempat para wali, yang kemudian dikenal sebagai wali songo atau sembilan wali, membentuk karakter mereka. Dari pesantren Giri, santri seperti Datuk ri Bandang dari Minang membawa ajaran Islam ke Makassar dan wilayah Timur Indonesia lainnya. Dari Makassar, tokoh seperti Syekh Yusuf lahir, menjadi ulama besar dan pionir dalam gerakan nasional. Peradaban Islam kemudian menyebar dari Makassar ke Banten,</p>		
--	--	--	--	--

		Srilanka, dan bahkan hingga Afrika Selatan.		
3	<i>The Financial Aspects of Islamic Education (An Idea to Improve the Quality of Islamic Education in Islamic Boarding Schools)</i> ”	<p>Pembiayaan pendidikan dalam Islam menekankan penyaluran biaya dan tanggung jawab pendidikan yang diberikan oleh masyarakat. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan mencakup besaran biaya dan sumber pendanaan. Biaya pendidikan diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan Baitul Mal. Tantangan utama dalam pembiayaan pendidikan Islam muncul karena dana terbatas dan dukungan minim dari masyarakat. Dalam hal ini, penyelenggara pendidikan perlu merencanakan dengan cermat. Jika pelaksanaannya bergantung pada pihak tertentu, ini menandakan kurangnya keseriusan penyelenggara pendidikan dalam</p>	Sama-sama membahas tentang pembiayaan pendidikan Islam baik dari masyarakat maupun dari pemerintah	Dalam penelitian Abd. Mukti ini tidak membahas Sejarah secara sosio historis mengenai pembiayaan secara utuh. Dan tidak menggunakan UU terbaru sebagai rujukan pembaiayaan pesantren.

		mengembangkan pendidikan.		
--	--	---------------------------	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat penulis simpulkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tulisan ini berfokus pada dampak kebijakan undang-undang terhadap perkembangan pendidikan Islam di pesantren serta campur tangan pemerintah dalam menjadikan pesantren lebih baik dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dan berjenis penelitian studi kepustakaan. Menurut Moleong, sebagaimana dikemukakan oleh Siyoto bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata ataupun berbentuk ungkapan lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati, dan metode kualitatif ini berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif, rinci, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan fakta-fakta hasil penelitian yang disajikan sebagaimana adanya. dan hasil penelitian deskriptif ini sering juga digunakan, atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik.¹⁵

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁶ Menurut Kaelan penelitian Pustaka adalah penelitian yang memerlukan olahan

¹⁴ *Ibid*, 28

¹⁵ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara, 2009), 45.

¹⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

kebermaknaan secara filosofis, teoritis yang terkait dengan nilai.¹⁷ Sedangkan analisis isi (*Content Analysis*) adalah kegiatan penelitian yang hasilnya berupa kesimpulan tentang gaya buku, kecenderungan isi buku, penulisan, tata letak, ilustrasi dan sebagainya.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui dua sumber, yaitu sumber data primer adalah sumber data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan objek material penelitian.¹⁹ Dan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pedoman UU nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Selain bersumber dari sumber data primer, data dalam penelitian ini juga bersumber dari data sekunder, yaitu diperolehnya data yang bersumber dari buku-buku serta bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek material penelitian, walaupun bukan merupakan Pedoman UU Pesantren yang dikaji, atau buku lain yang merupakan pendukung dalam mendeskripsikan material penelitian.²⁰ Dan yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2021*.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema penelitiannya.²¹ Analisis data ini diharapkan dapat mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorisasikannya.²² Analisis Data dalam penelitian ini memanfaatkan pendekatan

¹⁷ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner: Metode Penelitian Ilmu Agama Interkonektif Interdisipliner dengan Ilmu Lain*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 6.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

¹⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Malang: Humaniora, 2010), 143.

²⁰ *Ibid*, 144.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 280.

²² *Ibid*, 281.

analisis kebijakan publik. Evaluasi terhadap semua tahapan siklus kebijakan publik, yang bertujuan untuk merumuskan opsi solusi alternatif terhadap penyelesaian masalah publik, umumnya dikenal sebagai analisis kebijakan. Penelitian kebijakan mencakup studi terkait perumusan dan perumusan kebijakan.²³ Analisa kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae, analisa kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu social terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka Upaya memecahkan masalah konflik.²⁴

Definisi kerja analisis kebijakan menurut Dunn ialah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. Berdasarkan definisi di atas ada empat hal yang terkandung dalam definisi tersebut:

- a. Sebagai ilmu sosial terapan, artinya suatu hasil nyata dari suatu misi ilmu pengetahuan yang terlahir dari gerakan profesionalisme ilmu-ilmu sosial.
- b. Menghasilkan dan mendayagunakan informasi, ialah suatu bagian dari kegiatan analisis kebijakan yaitu pengumpulan, pengolahan, dan pendayagunaan data agar menjadi masukan yang berguna bagi para pembuat keputusan.
- c. Menggunakan "metode inquiri" dan argumentasi berganda, ialah penggunaan jenis-jenis metode dan teknik dalam analisis kebijakan seperti metode yang sifatnya deskriptif, metode yang sifatnya preskriptif, metode yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat

²³ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Analisa Kebijakan Kontemporer* (Jakarta: Gramedia, 2021), 72.

²⁴ Aceh Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar* (Bandung: Rosdakarya, 1994), 40.

kualitatif. Penggunaan metode tersebut sangat tergantung pada sifat isu kebijakan yang sedang disoroti.

- d. Pengambilan keputusan yang bersifat politis, ialah suatu proses pendayagunaan informasi didalam proses pembuatan kebijakan publik.

Kebijakan publik sering disalahartikan sebagai riset akademik, riset kebijakan, perencanaan strategis, administrasi publik bahkan bahkan dengan jurnalistik. Berikut matriks perbedaan dan persamaan antara analisis kebijakan dengan hal yang disebutkan di atas dilihat dari segi fokus objektif, “klien”, dan gaya penerapannya:

Tabel 1.2.

Persaman dan Perbedaan Riset akademik dengan Analisis Kebijakan

	Fokus Sasaran	“Klien”	Gaya Penerapan
Riset Akademik	Membangun teori untuk memahami masyarakat	“Kebenaran” menurut suatu disiplin ilmu	Metode yang ketat untuk membangun dan menguji teori; biasanya retrospektif
Riset Kebijakan	Memprediksi dampak perubahan variabel yang dapat diubah oleh kebijakan publik	Aktor dalam lingkup kebijakan; disiplin ilmu yang terkait	Penerapan metodologi formal terhadap pertanyaan yang relevan dengan kebijakan; prediksi konsekuensi
Perencanaan Strategis	Mendefinisikan dan mencapai keadaan masa depan masyarakat yang diinginkan	“Kepentingan umum” yang ditentukan secara profesional	Aturan yang ditetapkan dan norma profesional; spesifikasi tujuan dan sasaran
Administrasi Publik	Pelaksanaan secara efisien program yang ditetapkan oleh proses politik	“Kepentingan umum” yang diwujudkan dalam program yang direncanakan	Manajerial dan Legal
Jurnalistik	Memusatkan perhatian masyarakat pada	Masyarakat umum	Deskriptif

	permasalahan kemasyarakatan		
Analisis Kebijakan	Perbandingan sistematis dan evaluasi alternatif yang tersedia bagi aktor publik untuk memecahkan masalah social	Orang atau lembaga tertentu sebagai pengambil keputusan	Sintesis penelitian dan teori yang ada untuk yang ada untuk memprediksi konsekuensi dari alternaif proses

4. Tahap Penelitian

Analisis isi yang peneliti lakukan, melalui tahap-tahap berikut:²⁵

- a. Tahap simbolik. Menangkap objek penelitian yang berupa bahasa agama, satuan frasa, klausa dan wacana.
- b. Tahap Penggalian Makna. Memahami dimensi-dimensi objek penelitian, memahami unsur-unsur serta keterkaitannya dengan sistem nilai yang ada.

Tahap Kehidupan Simbol. Pemahaman melalui insight serta akal budimanusia, dengan cara meenhubungkan objek data dengan pengetahuan dalam diri manusia secara holistis, baik moral, religius,estetis serta nalar.

²⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipline*, (Malang: Humaniora, 2010),168-169.